

Village Fund Allocation and Community Development Practices in Rangkah Kidul: Alokasi Dana Desa dan Praktik Pengembangan Masyarakat di Rangkah Kidul

Arik Atus Solikah

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Isna Fitria Agustina

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

General Background: Village funds constitute a central policy instrument for supporting rural development and community welfare in Indonesia. **Specific Background:** In Rangkah Kidul Village, these funds have been allocated to physical infrastructure and non-physical programs such as health services, social assistance, and community empowerment. **Knowledge Gap:** Existing studies often emphasize financial outcomes, while limited attention is given to how village fund allocation is realized in daily governance practices and perceived by the community. **Aims:** This study aims to describe the utilization of village funds in supporting development activities and community programs in Rangkah Kidul Village, Sidoarjo Regency. **Results:** Using a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and documentation, the findings show that village fund allocation aligns with development priorities, particularly infrastructure provision, health services, and social assistance, although challenges remain in human resource capacity and administrative procedures. **Novelty:** This study offers contextual insight into village-level governance by integrating community perceptions with program implementation processes. **Implications:** The findings provide practical references for village governments to improve participatory planning, administrative readiness, and sustainable community development practices.

Highlights:

- Village fund allocation prioritizes infrastructure and basic community services.
- Community participation supports the implementation of development programs.
- Human resource capacity remains a key challenge in village governance.

Keywords: Village Funds; Rural Governance; Community Development; Village Infrastructure; Local Empowerment

Pendahuluan

Salah satu isu terpenting di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, adalah pembangunan. Masyarakat pedesaan, terutama di daerah terpencil, kurang mendapatkan pembangunan karena kurangnya perhatian dari pemerintah [1]. Mengacu pada yang sudah ditetapkan undang-undang No. 6 tahun 2014 desa adalah sebuah wilayah yang terdiri atas seluruh penduduk yang diatur oleh hukum dan bersedia menjalankan tugas dalam mengelola dan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat [2]. Desa membantu pemerintah daerah pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan, termasuk pembangunan [3]. Dana Desa merupakan dana bantuan pemerintah yang diterima desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan masing-masing Desa juga nantinya diberi dana tambahan yang dikelola untuk pengentasan kemiskinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan. Salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan 1) Pemberdayaan meliputi Kesehatan contoh posyandu untuk lansia dan balita, pos gizi untuk anak-anak dan balita, stunting untuk penanganan anak kurang gizi. 2) Perempuan kegiatan lansia dan jasmani 3) Melalui inisiatif seperti bantuan langsung dan bantuan langsung tunai (BLT), ekonomi secara langsung mendukung lingkungan sekitar. Desa berhak mengontrol sumber daya dan juga kewenangan mereka [4].

Memaksimalkan pembangunan diseluruh desa merupakan tujuan pemerintahan pusat untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan [5]. Agar perangkat desa dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat atas kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa, maka pemerintah desa juga harus mampu mengawasi dan mengelola seluruh kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah desa dan memungkinkan terlaksananya program-program pemerintah yang telah direncanakan dengan baik dan efisien, maka kepala desa dan perangkatnya harus memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah memberikan Dana Desa kepada desa-desa untuk membantu kebutuhan operasional pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 01/2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018. Permendagri ini mengatur cara mengelola keuangan diDesa, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, serta penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akibatnya, anggaran Desa (DD), sebuah anggaran unik yang diambil dari APBN, telah diberikan kepada Pemerintah Desa secara langsung oleh Pemerintah Pusat [6]. Dana Desa ialah dana APBN yang dikirimkan melewati APBD Kabupaten atau Kota dan mengutamakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa [7], [8].

Untuk memastikan keuangan, anggaran, dan perencanaan desa untuk tahun 2018-2023. Harus memanfaatkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018, yang membahas sejauh mana dan seberapa penting penggunaan dana desa untuk menghentikan penyimpangan. Pertumbuhan desa di setiap kabupaten di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Anggaran Dana Desa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1. Program dan inisiatif yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat diberikan prioritas pendanaan melalui Dana Desa [9]. Kinerja pengawasan aparat desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) sangat memprihatinkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili pemerintah desa dan memastikan bahwa sumber daya desa dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat. Desa secara fisik terhubung dengan pemerintahan desa. Desa itu sendiri menjadi objek pembangunan juga objek untuk menciptakan kemasyhuran masyarakat. Tujuan dari penelitian ini agar bisa memahami efektivitas pengelolaan desa yang dipersepsi oleh masyarakat dan menilai tingkat keberhasilan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

Mengacu pada uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo dan meninjau efek pengelolaan dana desa yang dirasakan masyarakat terhadap pembangunan dan pemberdayaan diantaranya yang *Pertama*, Sebagian warga kurang pemahaman terkait kegunaan dari pengelolaan dana desa. Selain itu, masyarakat lebih jarang berpartisipasi dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, Kurang optimalnya pemakaian dana desa untuk pengembangan usaha rumahan yang akan dikembangkan menjadi UMKM karena warga sulit untuk diajak berpartisipasi. *Ketiga*, Kurang optimalnya pemakaian dana desa untuk pengembangan usaha rumahan yang akan dikembangkan menjadi UMKM karena warga sulit untuk diajak berpartisipasi. *Keempat*, Proses pencairan dana yang tidak teratur menjadikan perangkat desa menemui kesulitan untuk merencanakan anggaran kegiatan, sehingga kegiatan yang memerlukan uang dengan jumlah besar akan dihutangkan dipengalokasian yang lain. *Kelima*, Warga dalam hal mengoptimalkan bantuan langsung tunai dirasa belum dipakai untuk memakmurkan hidup mereka. Saat ini penerima bantuan di desa Rangkah Kidul ada 67 orang yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) setiap 3 bulan sekali.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan terencana yang diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu pihak. Dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi setiap individu dan masyarakat luas karena berhubungan dengan arah yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan [10]. Di desa Rangkah Kidul juga ada pembangunan fisik maupun non fisik yang terasa manfaatnya oleh masyarakat. Semua pembangunan bertujuan untuk keperluan masyarakat yang diatur didalam Peraturan Desa Rangkah kidul No. 3 tahun 2023 [11].

Tabel 1. Rincian Program Pembangunan

No.	Nama kegiatan	Deskripsi	Jumlah Anggaran
-----	---------------	-----------	-----------------

1	Pembangunan gorong-gorong	Kegiatan ini dilaksanakan apabila adanya keluhan warga.	Rp. 180.000.000.
2.	Pembangunan infrastruktur gedung rapat	Karna tidak adanya warga untuk saranarapat.	Rp.75.000.000.
3.	Pembangunan infrastruktur gedung serbaguna	Tidak adanya gedung rapat di balai desa yang lama.	Rp. 3.000.000.

Sumber: Pemerintah Desa Rangkah Kidul, 2024

Program atau kebijakan yang buat oleh pemerintah harus berdasarkan skala prioritas untuk mencegah kenaikan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia [12]. Upaya pemerintah desa dalam menciptakan serta meninggikan kapabilitas dan kemandirian masyarakat secara perseorangan atau kelompok guna menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Masyarakat rangkah kidul kini sudah merasakan manfaat dari pemberdayaan tersebut.

Tabel 2. Rincian Anggaran Tahun 2019 dan 2020

No.	Tahun	Bidang	Jumlah
1.	2019	Penyelenggaran pemerintahan desa	Rp. 494.587.000
		Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 1.151.000.000
		Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 47.400.000
		Pemberdayaan masyarakat	Rp. 145.000.000
		Penyelenggaran pemerintahan desa	Rp. 376.085.000
		Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 1.205.500.000
2.	2020	Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 20.880.000
		Pemberdayaan masyarakat	Rp. 209.000.000

Sumber: Pemerintah Desa Rangkah Kidul, 2024

Diantaranya, pemerintah Desa Rangkah Kidul telah mengembangkan infrastruktur pada tahun 2019: renovasi gedung rapat, pagar makan, gorong-gorong, pemasangan paving, dan untuk pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu, APBD Kabupaten atau Kota di peruntukkan untuk membiayai UMKM. Pada tahun 2019 saja, Pemerintah Desa Rangkah Kidul mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar Rp 1.837.987.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Desa Rangkah Kidul menerima Rp 1.811.465.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk tahun 2020. Dari dana tersebut dikelola untuk bantuan langsung tunai BLT serta modal untuk warga yang menjalankan UMKM. Desa juga akan mendapatkan hasilnya dengan mendatangkan pelatih dan distribusi produk melalui *online* atau *offline*. Jika melakukan *online* desa bisa membantu melakukan pembuatan aplikasi berupa *marketplace*, shopee, Instagram, sedangkan pemasaran berupa *offline* bisa memasarkan ke toko-toko, membuat bazar umkm, serta memasarkan kepada ibu-ibu PKK antar desa.. Dana tersebut kemudian dikelola oleh pemerintahan desa untuk melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan bersama yang

diperoleh dari ADD (Alokasi Dana desa) dan APBD.

Sebuah desa kecil bernama desa Rangkah Kidul menempati area seluas kurang lebih 7,5 km. Pemukiman ini terletak di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Desa Rangkah Kidul merupakan daerah penghasil bandeng terbesar di Sidoarjo. Selain memproduksi sandal hotel dan tas laundry hotel, UKM di desa ini juga berbentuk usaha rumahan yang memproduksi kasur, sarung bantal, dan guling. Pengelolaan ini merupakan cara lain yang dilakukan oleh masyarakat di Umkm untuk memajukan dan memperkuat perekonomian desa.

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan regional dan nasional, pembangunan desa menjadi sangat penting. Menurut Sondang (2005) dalam Zakiah (2019), pembangunan desa adalah suatu proses yang lengkap yang melibatkan sejumlah tindakan yang dilakukan di lingkungan desa untuk mencapai tujuan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan meningkatkan kesejahteraan. Keefektifan pembangunan dana desa dapat dievaluasi dari tujuan yang diacapai. Sumanth (Darsono dan Siswadoko, 2011:196) mendefinisikan efektifitas adalah seberapa baik tujuan dan prestasi yang akan dicapai dibandingkan dengan apa yang mungkin dapat dicapai harus tetap manjaga kualitas. Menurut Stoner (Darsono dan Siswadoko, 2011:196) menerangkan bahwa efektifitas merupakan sebuah rancangan yang luas yang meliputi banyak faktor dari luar dan dalam yang memiliki hubungan dengan tingkatan keberhasilan suatu organisasi dengan memenuhi tujuan atau sasaran organisasi.

Penelitian sebelumnya dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, Agus dkk. 2021 melakukan penelitian berjudul "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan desa berbasis Islam pada Desa Patilereng." Berdasarkan konsep-konsep Islam, seperti tauhid, kenabian, kepemilikan, keadilan, keseimbangan, masalah, dan bantuan, peneliti ini menyimpulkan bahwa penyusunan secara Islam di Desa tersebut sudah bermanfaat. Serta dalam proses pengelolaan sudah melaksanakan tiga tahapan yakni: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

Penelitian kedua, berjudul "Efektivitas Penggunaan Dana Desa pada Pemberdayaan maupun Pembangunan Masyarakat pada Desa Humba" dilakukan oleh Vanti et al. 2021. Menurut peneliti ini, pemanfaatan Dana Desa pada tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sangat efektif, dengan analisis data efektivitas yang menghasilkan nilai lebih dari 100%. Meskipun masih diperlukan lebih banyak lagi di bidang pembangunan desa agar dapat dikatakan efektif, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan keuangan desa atas pembangunan dan pemberdayaan warga di Desa Humbia telah dilakukan dengan tepat sasaran.

Penelitian ketiga, "Efektivitas Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa di Desa Talawaan" dilaksanakan oleh Antou dkk. 2019. Menurut peneliti ini, hasil dari uji keefektifan Dana Desa di Desa tersebut sudah masuk dalam kategori sangat efektif dan dinilai sudah tepat sasaran. Penyebaran kuesioner yang dilakukan semakin mendukung gagasan bahwa keuangan desa dapat secara langsung mempengaruhi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dan dapat digunakan untuk membangun fasilitas desa dan masyarakat yang sesuai dengan peruntukannya.

Adapun penelitian yang keempat oleh Mulyana, dkk 2024 dengan penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Desa Tambusui Batang Dui". Menurut penelitiannya, administrasi Dana Desa di desa tersebut termasuk dalam kategori agak efektif karena beberapa warga belum melihat kemajuan desa karena berbagai alasan. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya terlibat dalam kegiatan pemerintahan adalah salah satunya.

Dalam hal ini, kepala desa juga memiliki peran yang terpenting dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo agar lancar dan mampu membuat desa menjadi maju dan meningkat Agustina et al. (2024). Dengan demikian, peneliti ingin meneliti keefektifan Dana Desa terhadap pembangunan di desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo. Menurut teori dari Gibson (dalam Nurhayati, 2017) untuk mengevaluasi efektivitas, ada dua pendekatan: teori tujuan atau sistem. Dalam pendekatan pertama, perumusan dan perhitungan efektivitas untuk mencapai suatu tujuan ditentukan oleh upaya-upaya kooperatif. Dalam pendekatan kedua, Penyesuaian terhadap tuntutan eksternal ditekankan sebagai kriteria untuk mengevaluasi efektivitas dalam pendekatan teori sistem. Dalam pendekatan teori sistem, konsep efektivitas harus mencerminkan dua kriteria: keseluruhan input-proses-output.

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, kepala desa Rangkah Kidul membangun sebuah infrastruktur yang berupa pembuatan gorong-gorong yang dilakukan di 2 RT, pembuatan gorong-gorong ini dibuat karena sering terjadi banjir di daerah tersebut agar juga memberikan kenyamanan pada warga sekitar. Tidak hanya itu pembangunan lain dilakukan seperti membangun gedung rapat, yang berniat untuk memfasilitasi warga dan perangkat desa, sebagai tempat bermusyawarah dan dapat melayani warga dengan maksimal. Gedung rapat ini dibutuhkan karena sebelumnya desa rangkah kidul ini tidak memiliki gedung rapat dan pelaksanaan rapat biasanya dilakukan di ruangan terbuka. Untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang memungkinkan kenyamanan dan dukungan dalam hal pelayanan di desa, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sangat tepat. Namun dibalik kelancaran pembangunan yang sudah dilakukan ada juga kondisi dan permasalahan yang kerap terjadi pada desa, contohnya banyaknya permintaan masyarakat yang berbanding terbalik dengan keuangan desa, selain itu ada juga permintaan warga yang muncul disaat pembangunan sudah dimulai yang mana dari desa tidak bisa merubah spesifikasi daripada kegiatan pembangunan tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah desa dan juga warga berdiskusi dengan baik agar pembangunan berjalan dengan baik. Dengan begitu, tujuan pada penelitian ini yakni untuk melihat seberapa efektifnya Dana Desa untuk pembangunan di Desa Rangkah Kidul.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Sugiyono (2018) menegaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam pengaturan ilmiah di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen. Data primer dan sekunder dikumpulkan. Sumber data utama untuk penelitian ini berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang semuanya merupakan metode yang akan diimplementasikan dalam pengumpulan data. Di sisi lain, sumber data sekunder berasal dari hasil dokumentasi. Aparat desa dan warga, bersama dengan Kepala Desa, menjadi informan dalam penelitian ini. Miles dan Huberman (2014) menggambarkan teknik analisis data sebagai pendekatan model interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mempermudah pengumpulan data bagi para peneliti, data ini harus direduksi dengan cara meringkas, memilih informasi yang paling penting, memusatkan perhatian pada beberapa poin penting, dan menghilangkan informasi yang tidak perlu. Reduksi data oleh peneliti melibatkan penelaahan seluruh informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan setelah reduksi data. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memfasilitasi pemahaman situasi. Untuk membuat informasi lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis menyusun cerita berdasarkan detail yang telah mereka pelajari. Penarikan kesimpulan adalah langkah selanjutnya. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dimulai dari temuan sementara dan kemudian memerlukan verifikasi data lebih lanjut yang didukung oleh bukti-bukti yang ada seiring dengan bertambahnya jumlah data. Penelitian ini dilakukan di Desa Rangkah Kidul, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023.

Hasil dan Pembahasan

Desa Rangkah Kidul adalah desa yang berada di sebuah Kecamatan di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan merupakan desa kecil yang memiliki luas sekitar 7,5 km. Desa penghasil bandeng terbesar di Sidoarjo adalah Rangkah Kidul. Usaha rumahan di desa ini memproduksi kasur, guling, dan sarung bantal. Tidak hanya itu desa ini juga memproduksi sandal hotel dan laundry bag hotel. Pengelolaan ini juga bentuk tekad warga sekitar dalam umkm bisa maju dan bisa membuat ekonomi desa akan lebih kuat. Kemudian, peneliti dapat menjelaskan mengenai hasil wawancara oleh informan penelitian dan observasi dilapangan mengenai Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo. Menurut ukuran efektivitas Duncan dalam Richard M. Steers (2005: 64), efektivitas ditentukan oleh tiga indikator, yakni :

A. Pencapaian Tujuan

Upaya komprehensif untuk mencapai tujuan yang perlu dilihat sebagai sebuah proses disebut pencapaian tujuan. Oleh karena itu, tahapan diperlukan baik dalam arti pentahapan komponen-komponennya maupun dalam arti klasifikasi untuk memastikan pencapaian tujuan akhir. Dalam teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers, pencapaian tujuan yakni sejauh mana sebuah program dapat dicapai tepat sasaran dalam kurun waktu tertentu dan melalui usaha-usaha yang sudah direncanakan. Sejauh mana program yang diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk menilai efektivitasnya. Desa menerima dana setiap tahun dari Dana Desa yang berasal dari anggaran nasional. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan nasional, dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa. Dana Desa yang diberikan kepada desa-desa mencapai 1 miliar setiap tahunnya, dengan 70% digunakan untuk pembangunan dan 30% untuk biaya operasional. Karena Dana Desa diciptakan untuk mendukung pembangunan desa, maka penggunaannya hanya dapat dikatakan efektif jika sesuai dengan peraturan desa itu sendiri. Pembangunan, menurut Riyadi, merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan aktivitas melalui upaya-upaya yang terencana (dalam Mamesah, 2015). Karena pemerataan pembangunan merupakan komponen dari pembangunan desa dan hasilnya secara langsung mempengaruhi kepentingan mayoritas penduduk Desa Rangkah Kidul dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal, maka pembangunan desa menjadi penting dalam konteks pembangunan daerah. Berikut sebagian wawancara yang peneliti sampaikan kepada perangkat Desa Rangkah Kidul. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Shofyanur selaku kaur umum di Desa Rangkah Kidul, beliau menyampaikan bahwa :

"Pengoptimalisasi dana desa terfokus pada penciptaan infrastruktur guna untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan, fasilitas pos pelayanan terpadu (posyandu) dan kegiatan operasional kesehatan. Sasaran utama pemerintah adalah menurunkan angka kematian ibu dan anak."

Berdasarkan pernyataan tersebut, pembangunan gorong-gorong, balai pertemuan, dan gedung multifungsi - tiga kebutuhan utama masyarakat Desa Rangkah Kidul - diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur program Dana Desa. Sumber daya manusia di desa yang mayoritas belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dan proses administrasi pemerintahan desa yang masih dalam tahap awal menjadi tantangan utama. Dalam upaya mengatasi masalah ini, perangkat desa berkonsultasi dengan penduduk setempat untuk menyelesaikan masalah yang muncul saat memilih jadwal kerja. Rincian pencapaian

pembangunan Dana Desa juga tersedia di bawah ini:

Tabel 3. Capaian Pembangunan Infrastruktur

Jenis Pembangunan	Tanggal Pelaksanaan	Alasan/Kebutuhan	Anggaran (Realisasi)	Keterangan
Pembangunan Gorong-gorong	15 April 2024	Dilaksanakan karena adanya keluhan warga dan pengurangan resiko banjir dan mempercepat pengaliran air akibat hujan	Rp. 180.000.000	Selesai sesuai rencana
Pembangunan Infrastruktur Gedung Rapat	9 Februari 2023	Karena tidak adanya sarana rapat bagi warga	Rp. 75.000.000	Selesai sesuai rencana
Pembangunan Infrastruktur Gedung Serbaguna	15 Agustus 2024	Tidak adanya gedung rapat di balai desa yang lama dan digunakan untuk kegiatan desa/persewaan	Rp. 3.000.000	Selesai sesuai rencana

Sumber: Pemerintah Desa Rangkah Kidul, 2024

Dari tabel 3 diatas, kita tahu bahwasanya pembangunan Infrastruktur di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo sudah tercapai sesuai tujuan dengan menggunakan Dana Desa. Hal itu juga dapat dibuktikan dengan adanya bukti dokumentasi dibawah ini.

Gambar 1. Pembangunan Gorong-gorong di Desa Rangkah Kidul



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Gambar 2. Pembangunan Infrastruktur Gedung Rapat di

Desa Rangkah Kidul



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Gambar 3. Pembangunan Infrastruktur Gedung Serbaguna di Desa Rangkah Kidul



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Berdasarkan pernyataan dan gambar diatas jika dikaitkan dengan indikator pencapaian tujuan yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rangkah Kidul sudah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan. Meskipun dalam pelaksanaannya dalam indikator pencapaian tujuan belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hambatan seperti sumber daya manusia belum dimaksimalkan dengan baik akan tetapi hal itu sudah diatasi oleh aparat desa dan warga sekitar.

B. Integritas

Ini adalah ukuran seberapa baik sebuah organisasi bersosialisasi, berkomunikasi, dan membangun konsensus-sebuah proses yang menggabungkan sosialisasi. Dalam sebuah kelompok, sosialisasi adalah proses di mana norma, nilai, dan perilaku ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini juga berfungsi sebagai pengukur kapasitas organisasi untuk membangun konsensus dan sosialisasi. Tidak diragukan lagi, akan ada pertemuan beberapa orang untuk mendiskusikan Dana Desa selama pengelolaan desa. Tujuan utama Dana Desa adalah untuk mendukung dan memungkinkan pelaksanaan proyek dan inisiatif lokal yang berkaitan dengan pembangunan. Manajemen desa juga harus berbicara dengan masyarakat setempat tentang bagaimana melaksanakan program pembangunan. Hasil wawancara dan angket bersama Bapak Eko selaku bendahara dan salah satu warga di Desa Rangkah Kidul, beliau menyampaikan :

“Dana Desa terus menerus disosialisasikan terhadap masyarakat, dalam pengelolaan dana desa masyarakat bisa tahu akan program-program dan berbagai pembangunan yang telah dilakukan masyarakat menggunakan dana desa, desa perlu terbuka terkait besaran dana yang dikeluarkan supaya jelas dan tidak terjadi penyalahgunaan.”

Sosialisasi program Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Rangkah Kidul dengan mengkomunikasikan prioritas penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Rangkah Kidul dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bendahara desa dan salah satu warga. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat. Karena pemerintah telah mempercayai mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, maka masyarakat merasa percaya.

Gambar 4. Sosialisasi Pemerintah Desa dan Warga di Desa Rangkah Kidul



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Berdasarkan gambar 4. Dapat diketahui bahwa pada indikator integrasi Pemerintah Desa rangkah Kidul sudah mengadakan sosialisasi yang diadakan setahun sekali, serata partisipasi warga yang bagus terakit pembangunan infrastruktur desa.

C. Adaptasi

Adaptasi ialah kemampuan organisasi untuk membiasakan diri terhadap lingkungannya, yang berhubungan dengan kesesuaian dalam melaksanakan program di lapangan. Salah satu contoh adaptasi adalah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat setempat saling bekerja sama dalam melaksanakan atau memanfaatkan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, dan masyarakat dapat merasakan dengan cepat karena adanya anggaran Dana Desa. Salah satu pemanfaatan anggaran adalah pada kesehatan masyarakat. Hasil wawancara bersama Bapak Shofyanur selaku kaur umum di Desa Rangkah Kidul, beliau menyampaikan :

"adanya anggaran dana desa dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menggunakan dana desa. Pemerintah juga mengadakan program yang berhubungan dengan kesehatan seperti adanya sosialisasi, pemeriksaan gratis, dan pengobatan gratis baik untuk seluruh masyarakat."

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Rangkah Kidul, pelaksanaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan inisiatif kesehatan masyarakat seperti posyandu, pos gizi bulanan, stunting, dan inisiatif lain yang mendorong kesehatan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola dana desa.. Hal itu dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rangkah Kidul.

Gambar 5. Pelaksanaan Posyandu



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Gambar 6. Pelaksanaan Pos Gizi



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Gambar 7. Pelaksanaan Stunting



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Gambar 8. Kegiatan Perempuan



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Gambar 9. Kegiatan BLT (Balai Langsung Tunai)



Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Rangkah Kidul (2024)

Berdasarkan beberapa angka yang disebutkan di atas, indikator adaptasi yang membutuhkan penyesuaian di dalam

organisasi untuk membawa individu sejalan dengan perubahan lingkungan-sangat efektif.

Hasil riset menjelaskan bahwa memaksimalkan penggunaan dana desa bisa menaikkan kualitas pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu aspek dalam upaya menyejahterakan desa sesuai dengan tujuan alokasi Dana Desa adalah pengelolaan dana desa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat [13]. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Secara tidak langsung juga berdampak pada perbaikan kondisi perekonomian di Desa Rangkah Kidul kabupaten sidoarjo. Program pemberdayaan masyarakat dibutuhkan disetiap desa untuk merealisasikan pembangunan yang sudah direncanakan. Gagasan serta pemikiran dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun desa. Pelaksanaan program dan kegiatan desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa merupakan penggunaan utama dana desa [10].

Meningkatkan Kesehatan masyarakat desa rangkah kidul salah satu dampak penyaluran desa, untuk pembaharuan tempat pemeriksaan kesehatan milik desa, tempat layanan kesehatan ibu dan anak serta tempat untuk posyandu. Undang-undang nomor 11 tahun 2009, menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat dapat ditinjau dari finansialnya yang terpenuhi, keagamaan dan sosial, warga negara juga berhak hidup berkecukupan dan mau untuk mengupgrade diri, sehingga bisa mengerjakan berbagai kegiatan kemasyarakatan bersosial. Takaran taraf kesejahteraan dilihat dari kesanggupan setiap perorangan atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

Pemerintah harus menginformasikan kepada semua masyarakat desa mengenai alokasi dana desa untuk meminimalisasi penyalahgunaan dana desa. Memperbaiki pelayanan publik, menanggulangi kemiskinan, menaikkan perekonomian desa, mencegah adanya ketimpangan pembangunan antar desa dan memakmurkan masyarakat desa menjadi fokus utama memajukan desa. Hasil penelitian dinilai relevan terhadap Peraturan Menteri No. 16 tahun 2018 membahas perihal skala pengutamaan dalam menggunakan dana desa. Alih-alih menjadi proses yang terkoordinasi atau stabil, ekonomi yang sedang berkembang adalah sebuah kondisi perubahan yang konstan dan tidak terencana [14]. Hasil kajian dana desa dapat membantu meningkatkan taraf pembangunan, dalam hal pendidikan masyarakat juga pada kesehatan masyarakat. Hasil penelitian persentase efektivitas lebih dari 100% penggunaan dana desa dikatakan sangat efektif, disebabkan target dana desa ditetapkan lebih tinggi daripada target dana tahun sebelumnya.

Keberhasilan Keefektifan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Rangkah Kidul sangat bergantung pada koordinasi antar pemerintah desa dan masyarakat setempat. Namun ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam keefektifan dana desa terhadap pembangunan di Desa Rangkah Kidul, berikut faktor pendukungnya yakni: Penyedia infrastruktur yang memadai akan sangat mendukung dalam pembangunan desa karena dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat pembangunan daerah, dan meningkatkan kemandirian perekonomian, Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, hal ini sangat mendukung proses pembangunan dan dapat mengatasi tantangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan desa yang maju dan mandiri, dan Geografis yang unik maksudnya memiliki letak wilayah yang khas dan memiliki keanekaragaman kondisi alam. Hal ini dapat mendukung pembangunan suatu wilayah. Sedangkan faktor penghambatnya yakni : Taraf sumber daya manusia yang ada di desa sebagian besar belum dapat dimaksimalkan dengan baik, Adanya prosedur mengenai organisasi pemerintah desa yang belum sempurna dari dibuatkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, pemerintahan desa dinilai membutuhkan beberapa peraturan lagi mengenai pelaksanaan baik untuk acuan atau pelaksanaan, Buruknya kapasitas kesiapan rancangan di tingkat desa, seringkali mengakibatkan tidak adanya sinkronisasi antara output (hasil/keluran) implementasi kebijakan, Sarana dan prasarana untuk mendukung fungsional administrasi pemerintah masih sangat terbatas. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, namun juga dapat menurunkan motivasi para penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan dan menghambat pencapaian tujuan, tugas, pekerjaan, serta Banyaknya wartawan yang ada di sidoarjo, karena ini terkadang mengganggu proses pembangunan dan menggali informasi dan mencari berita.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan yakni mengenai efektivitas dana desa terhadap pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo sudah dikategorikan sangat efektif menunjukkan bahwa dana desa yang teralokasi untuk terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan target. Dari hasil kuisioner responden menunjukkan bahwa dana desa dapat berfungsi secara langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rangkah Kidul Kabupaten Sidoarjo. Adanya pemanfaatan dana desa yang maksimal dapat ditarik kesimpulan bahwa dana desa dapat menekan angka kemiskinan, terlaksananya berbagai pembangunan dan pembaharuan fasilitas desa dan masyarakat yang dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat desa. Namun ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam keefektifan dana desa terhadap pembangunan di Desa Rangkah Kidul, berikut faktor pendukungnya yakni: Penyedia infrastruktur yang memadai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, Geografis yang unik. Sedangkan faktor penghambatnya yakni : Taraf SDM yang terdapat di desa sebagian besar belum dapat dimaksimalkan dengan baik, dan juga prosedur mengenai organisasi pemerintah desa belum sempurna.

Saran dari peneliti yakni merujuk pada hasil, pemerintah desa kedepannya diharapkan adalah menyusun pedoman pengaturan dan pengalokasian dana desa yang selalu fokus pada pengoptimalan peran dan lembaga pemerintahan. Managemen anggaran desa pada diberbagai daerah yang membutuhkan pengendalian dan akuntabilitas untuk memastikan dana yang tersalurakan sesuai dengan rencana. Kesejahteraan pekerja juga perlu mendapat perhatian supaya kegiatan perekonomian dapat dikelola secara efektif dan efisien, stabilitas keuangan dapat terus dikelola dan pencapaian trobosan serta inovasi yang berhasil. Peneliti berharap dari hasil penelitian ini kepada seluruh kalangan

masyarakat untuk senantiasa turut andil pada setiap kegiatan pemerintah Desa demi mewujudkan pembangunan yang dapat berimbas terhadap meningkatnya pendapatan, pendidikan dan kesehatan serta penyaringan tenaga kerja demi kesejahteraan masyarakat dijadikan parameter berhasilnya suatu pembangunan. Peneliti berikutnya diharapkan bisa membuat penelitian ini sebagai referensi dan bahan untuk melakukan penelitian lainnya. Terima kasih untuk perangkat desa yang sudah melakukan bimbingan selama saya menjalankan skripsi tugas akhir serta bantuan data.

Ucapan Terima Kasih

Saya berterima kasih kepada staf desa rangkah kidul kecamatan sidoarjo beserta teman seperjuangan ini dalam menyusun tugas karya tulis ilmiah ini supaya menjadi syarat untuk kelulusan. Terimakasih telah membantu untuk memberikan data maupun informasi tentang pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Desa Rangkah Kidul selama saya magang disana untuk mengetahui kegiatan ataupun informasi seputar dengan pelayanan maupun kegiatan. Selama saya magang ini banyak ilmu serta pengalaman pelayanan yang ada didesa beserta aplikasi untuk pengurusan berkas masuk.

References

- [1] I. Irmansyah, S. W. Mustafa, and R. S. Hamid, "Effectiveness of Village Fund Policy on Infrastructure Development," *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2, pp. 1086–1095, 2021, doi: 10.36778/jesya.v4i2.479.
- [2] I. W. W. Ananda, "Management of Village Funds for Development and Community Economic Improvement in Mustika Village, Kuranji District, Tanah Bumbu Regency," *Jurnal Kindai*, vol. 17, no. 1, pp. 32–43, 2019.
- [3] P. Antou, V. Rumante, and M. T. B. Maramis, "Village Fund Allocation for Development and Community Empowerment in Talawaan District, North Minahasa Regency," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 19, no. 2, pp. 131–140, 2019.
- [4] N. L. L. Aziz, "Village Autonomy and Village Fund Governance," *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 13, no. 2, pp. 193–211, 2016.
- [5] W. A. A. Ngurah Gede and D. A. Iskandar, "Village Fund Allocation and Regional Economic Growth in Indonesia," *Journal of Regional and Rural Development Planning*, vol. 7, no. 2, pp. 138–150, 2023, doi: 10.29244/jp2wd.2023.7.2.138-150.
- [6] A. Azhari and D. Suhartini, "Village Fund Allocation for Cash Transfers as a Form of Community Welfare During the COVID-19 Pandemic," in *Proceedings of the National Accounting Seminar and Call for Paper (SENAPAN)*, vol. 1, no. 1, pp. 407–417, 2021, doi: 10.33005/senapan.v1i1.257.
- [7] V. I. Damar, V. A. J. Masinambow, and A. T. Naukoko, "Village Fund Utilization for Development and Community Empowerment in Humbia Village, Sitaro Islands Regency," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 21, no. 3, pp. 1–12, 2021.
- [8] L. N. Fahri, "Implementation of Village Fund Policy and Village Financial Management," *Jurnal Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 75–88, 2017.
- [9] K. Dewi, Dwirini, and M. I. Siregar, "Village Fund Utilization and Development Performance Based on Regulation No. 19 of 2017," *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, vol. 5, no. 1, p. 15, 2021, doi: 10.31851/neraca.v5i1.5358.
- [10] D. Firmansyah, D. P. Susetyo, and M. Sumira, "Village Fund Allocation and Community Empowerment in Cibitung Village, Sukabumi Regency," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 168–181, 2020.
- [11] Government of Rangkah Kidul Village, *Village Medium-Term Development Plan (RKPDES) Rangkah Kidul 2024*, Sidoarjo, Indonesia, 2023.
- [12] R. Ekasari, *Village Fund Effectiveness Model for Assessing Village Performance Through Economic Empowerment*. Malang, Indonesia: AE Publishing, 2020.
- [13] A. Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, and S. Permata, "Village Fund Governance Based on Islamic Development Principles," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 52–66, 2021, doi: 10.47435/adz-dzahab.v6i1.584.
- [14] R. Alanos, D. Engka, and W. Rompas, "Village Fund Allocation and Community Welfare in Essang District, Talaud Islands Regency," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 21, no. 1, pp. 81–90, 2021.